BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mewujudkan pemerintah transparan, akuntabel perlu adanya pengelolaan barang milik Negara yang terekam jejak perjalanannya dan dengan ukuran yang pas dan jelas sehingga dapat di ikhtisarkan sesuai proses pelaporan akuntansi, agar dapat terlihat semua kegiatan ruang entitas tersebut.

Akuntansi pemerintah merupakan sebuah bidang dalam ilmu akuntansi di mana berfokus pada pelaporan pencatatan serta transaksi-transaksi yang telah terjadi pada lingkungan pemerintah. Tentunya untuk memudahkan dan menyalurkan informasi untuk perencanaan, pemantauan, pelaksanaan, penganggaran , pengendalian anggaran, pembuatan kebijakan, dan untuk menilai kinerja pemerintah tersebut.

Hal demikian harus dilakukan agar tidak ada penyelewengan dana dari para pegawai tentang aliran dana yang sudah di amanatkan fisik seperti bangunan, gedung serta yang lainnya. Pengumpulan bukti dokumen dari pengeluaran serta pemasukan yang diperoleh oleh sebuah badan pemerintahan dari pemerintah pusat harus transparan dan terbuka agar tidak ada kecurigaan dari masyarakat ataupun pegawai di dalam pemerintahan.

Jika hal demikian bisa dilakukan maka sistem pencatatan keuangan akan bisa memberikan sebuah informasi untuk semua orang yang membutuhkannya

untuk keperluan pribadi atau keperluan organisasi namun bukan untuk di salah gunakan agar tidak merugikan pemerintah ataupun orang lain.

Dalam mewujudkan sistem pemerintah yang baik khususnya di bidang akuntansi tentu perlunya prinsip demokrasi dalam menjalankannya. Pada proses tersebut ilmu akuntansi pemerintah berperan tentunya sebagai salah satu faktor pendukung untuk menunjang akuntabilitas sektor pemerinthan dalam menjalankan kegiatan pemerintahan. Alat ukur yang digunakan untuk mengukur seberapa akuntabilitas pemerintahan dimana akuntabilitas pemerintah merupakan alat ukur pengelolaan keuangan dan aset Negara. Pada berbagai faktor Keuangan berperan sangat penting dikarenakan aktivitas, dan kebijakan pada sektor politik, ekonomi, sosial serta budaya pada suatu negara.

Dalam pemerintahan akuntansi memeliki peranan atau pengelolaan keuangan Negara maupun aset Negara guna mewujudkan sebuah tata kelola yang sesuai dan dapat memberikan contoh yang baik, mulai tata cara pengelolaan keuangan desa, keuangan daerah, maupun pusat. Pada akuntansi pemerintah Prinsip akuntabilitas dan transparansi di gunakan tentunya untuk pengelolaan keuangan sebagai bentuk kewajiban bagi. pemerintah pusat, kota, desa tetapi juga bagi lembaga-lembaga maupun organisasi pemerintah lainnya karena segala hal tersebut bertujuan untuk kepentingan masyarakat.

Dalam mewujudkan pedoman pelaporan yang baik sebagaimana dibutuhkan pemerintah mengeluarkan peraturan pada tahun 2010 nomor 21 tentang standar akuntansi pemerintah (SAP), di mana sebelumnya hal telah diatur pada undang-undang tahun 2004 No 32 mengenai Pemerintah Daerah dan

berdasarkan hal tersebut pemerintah daerah mengeluarkan peraturan kembali pada tahun 2005 Nomor 24 yang berisi tentang Standar yang dipakai pada Akuntansi di pemerintahan.

Pusat sains Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional di mana berdasarkan Presiden disebut dengan (LAPAN), yang merupakan lembaga pemerintah non-kementerian dan memiliki pertanggung jawaban kepada Presiden di bawahi menteri yang berbidang pada urusan pemerintah dan berfokus pada teknologi dan riset. Tugas pokoknya melaksanakan tugas dalam bidang yang mencakup penelitian serta untuk mengembangkan aspek kedirgantaraan serta pemanfaatan juga penyelenggaraan keantariksaan dengan ketentuan peraturan yang berlaku.

LAPAN merupakan salah satu lembaga yang berada di bawah Badan keuangan dan akuntansi dimana kewajibannya yakni melakukan proses akuntansi serta melaporkan hasil dari apa yang telah dilakukan tentang pelaksanakan pengelolaan anggaran pendapatan serta belanja Negara. Pelaporan mencakup Neraca,perubahan ekuitas, Laporan Operasional, anggaran, serta Catatan pada Laporan Keuangan.

Pelaporan keuangan pada LAPAN dalam penyusunan tentunya mengacu Peraturan pemerintah Tahun 2010 No 71 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) juga syarat-syarat dalam pemanfaatan keuangan yang dapat dikatakan sehat dalam badan pemerintahan. Laporan yang lakukan LAPAN di harpkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para yang membutuhkan, dan dikhususkan sebagai sesuatu yang berguna untuk meningkatkan akuntabilitas pada

saat pertanggungjawaban serta juga dapat dilakukan dengan transparansi pengelolaan keuangan Negara kepada lembaga pemerintah. Laporan tersebut juga memberikan sebuah informasi untuk aktivitas manajemen guna mengambilan keputusan dengan usaha untuk terciptanya sebuah tata kelola pemerintah yang elok (good *govermance).*

Menurut Peraturan pemerintah Tahun 2010 No 71 yang menjelaskan tentang Standar Akuntansi Pemerintah, merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk menyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Sedangkan aset tetap PSAP No 07 adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Yang terdiri dari aset tetap tersebut diantaranya Tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Aset tetap akuntansi merupakan bentuk dari pengolahan aset milik Negara, di dalam Peraturan tahun 2006 nomor 6 pada Peraturan Pemerintah disebutkan bahwa Barang milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Sorotan utama penelitian adalah isi pernyataan Standar yang berlaku pada akuntansi khususnya aset tetap gedung atau bangunan mencakup, penilaian awal, pengeluaran setelah perolehan, pengukuran, penyusutan, penghentian serta pelepasan, dan pengungkapan.

Sebagaimana diharapkan apakah lembaga LAPAN tersebut telah menjalankan komponen tersebut sesuai Standar yang digunakannya. Dan dalam pelaporan aset tetapnya seperti berikut:

Tabel 1.1 Aset tetap dan Akumulasi penyusutan aset tetap

NO	ASET TETAP	NILAI AWAL	AKM. PENYUSUTAN	NILAI NETTO
1.	Tanah	187.454.981.200	0	187.454.981.200
2.	Peralatan dan mesin	58.252.760.250	41.994.676.606	16.250.083.644
3.	Gedung dan bangunan	33.758.964.223	2.337.488.457	31.419.475.768
4.	Jalan dan jembatan	359.675.000	99.463.565	260.211.435
5.	Irigasi	110.172.000	16.203.060	93.968.940
6.	Jaringan	244.719.000	29.050.680	215.668.320
7.	Aset tetap lainnya	880.329.900	0	880.329.900
Total		281.059.601.573	44.476.682.368	236.582.719.205

(Sumber: sumber data sekunder, Laporan Keuangan Pusat sains LAPAN)

Dari tabel di atas dapat memberikan gambaran tentang pencatatan aset tetap di lembaga pemerintah LAPAN tersebut. tetapi juga ditemukan pada laporan keuangan LAPAN salah satu tabel yang memperlihatkan besaran kesalahan Input IP pada lembaga tersebut, berikut tabel kesalahan input IP:

Tabel 1.2 Transaksi kesalahan Input IP LAPAN

AKUN NERACA/KELOMPOK BARANG		SAT	INTRAKOMPTABEL	
KODE	URAIAN		KUANTITAS	NILAI
133111	GEDUNG DAN BANGUNAN			
4.01.01	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT KERJA	UNIT	0	-7.509.064.000
4.01.02	BANGUNAN GEDUNG TEMPAT TINGGAL	UNIT	0	216.132.000
TOTAL				-7.292.932.000

(Sumber: sumber data sekunder, Laporan Keuangan Pusat sains LAPAN)

Dari hasil awal penelitian tersebut bahwa ditemukan ada beberapa permasalahan berkenaan dengan aset tetap salah satunya yaitu, kesalahan dalam menginput IP sebagai mana tabel di atas pada laporan Aset tetap Gedung dan Bangunan kesalahan input IP sebesar Rp.216.132.000, dan masih di Aset tetap Gedung dan Bangunan terjadi kesalahan sebesar (-RP 7.509.064.000), hal ini menimbulkan pertanyaan karena jumlah yang terjadi pada kesalahan input IP tersebut tergolong besar.

Hal ini bisa terjadi dikarenakan adanya permasalahan, belum direkamnya hasil IP tersebut, telah direkam tetapi belum tepat, ataupun terjadinya transaksi-transaksi lanjutan. Dampak dari kesalahan input data tersebut andai tidak diusut atau diketahui akan berdampak pada nilai aset tetap, dan nilai akumulasi penyusutan di Neraca, serta juga nilai biaya penyusutan pada laporan operasional. Tentunya kesalahan tersebut dapat berdampak pada laporan keuangan secara keseluruhan.

Dari data kesalahan input IP diatas juga ada isu yang berkembang dan sering terjadi dilingkungan lembaga pemerintah diantaranya adalah saldo aset tetap tidak dapat ditelusuri, aset tetap keberadaannya tidak diketahui, pihak lain

menguasai aset tetap, bukti kepemilikan aset tetap tidak mendukung dan sebagainya. Dari hal tersebutlah penulis tertarik untuk mengangkat judul dalam penulisan ini seperti berikut **"IMPLEMENTASI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH ASET TETAP GEDUNG DAN BANGUNAN PADA PUSAT SAINS LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN).**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari beberapa pernyataan tersebut, maka penelitian ini dilakukan sebagai bentuk untuk menjawab beberapa permasalahan dan pertanyaan sebagai berikut ini:

1. Bagaimana LAPAN menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Aset tetap Gedung Dan Bangunan?
2. Apakah perlakuan akuntansi LAPAN telah patuh dengan sistem yang diatur oleh (SAP), dalam mengelola Aset tetep Gedung dan Bangunan?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Adapun maksud dari penelitian seperti berikut ini:

1. Guna menggali lagi serta mengetahui pemahaman tentang Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada salah satu lembaga pemerintah
2. Untuk mengetahui secara langsung bagaimana praktek dan kondisi yang terjadi di LAPAN.

3. Untuk memperoleh data-data dan informasi mengenai Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada salah satu lembaga pemerintah.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan sebagai berikut:

1. Guna menjadi sumber informasi dan dimanfaatkan dalam bidang pendidikan, untuk menjadi gambaran bagi yang memerlukan.
2. Guna mengetahui pemahaman tentang Standar Akuntansi Pemerintah mengenai Aset Tetap Gedung serta Bangunan pada lembaga pemerintah LAPAN.
3. Untuk mengetahui telah menerapkan Standar Akuntansi Pemerintah Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada lembaga pemerintahan Pusat Sains (LAPAN).
4. Penelitian ini bertujuan guna mengetahui penyebab dari pendukung maupun menghambat dalam penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Aset Tetap Gedung dan Bangunan pada lembaga pemerintah LAPAN.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Dalam bidang akademis diharapkan penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat:

1. Menambah informasi mengenai teori-teori dalam Akuntansi Aset Tetap, khususnya di lembaga pemerintah.
2. Menambah informasi tentang pengelolaan asset tetap di lembaga Pemerintah sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh (SAP) No 07 Aset Tetap Gedung dan Bangunan.
3. Menambah referensi tentang pemahaman (SAP) 07 aset tetap gedung dan bangunan.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Kegunaan praktis dari penelitian ini yakni dapat memberikan sumbangsih pemikiran serta wawasan akuntansi, khususnya dalam pengelolaan Aset tetap gedung dan bangunan berdasarkan (SAP) No 07 Tentang Aset Tetap gedung dan bangunan. Dan diharapkan menambah literatur mengenai Aset tetap dan pengelolaannya.
2. Diharapkan dapat memberikan masukan mengenai pengelolaan Aset tetap gedung dan bangunan pada LAPAN dalam mengambil kebijakan dalam melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan aset tetap.

1.5 Waktu dan Lokasi Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian kali beralamat Jl. Dr. Djundjunan No. 133, Bandung 40173.

1.5.2 Waktu Penelitian

Kegiatan akan dilaksanakan dalam beberapa tahapan seperti berikut:

1. Magang, pengajuan judul, bimbingan Usulan penelitian: Februari 2021
2. Magang, seminar penelitian: Maret 2021
3. Magang, pengolahan data: Maret-Mei 2021
4. Bimbingan penyelesaian skripsi, Kolokium: Mei-Juni 2021
5. Sidang akhir: Agustus 2021

IKOPIN